

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan negara masih berkelanjutan, dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket Undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international *best practices*. Setelah Undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan yang disebutkan adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Tabel 1.1
Strategi Penerapan SAP Berbasis Akruwal secara Bertahap di Indonesia

2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruwal b. Mengembangkan <i>Framework</i> akuntansi berbasis akruwal
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>) c. Pengembangan kapasitas SDM
2012	a. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	a. <i>Ploting</i> beberapa KL dan BUN b. <i>Review</i> , evaluasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. <i>Pararel Run</i> dan konsolidasi seluruh laporan keuangan b. <i>Review</i> , Evaluasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP

Penerapan akruwal basis di sektor publik ini telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia. New Zealand merupakan negara pertama yang menerapkan akruwal basis di sektor publik tersebut. Pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an New Zealand telah melakukan reformasi besar pada manajemen pemerintahannya. Penggunaan basis akruwal telah menjadi salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik). Pengalaman New Zealand menunjukkan bahwa perubahan bukan sekedar wacana ataupun retorika tetapi sudah menjadi keberhasilan yang jauh lebih baik. Hasil dari sisi keuangan menunjukkan bahwa setelah mengalami defisit (anggaran) selama 20 tahun, kemudian berubah secara mengejutkan menjadi surplus dalam tiga tahun terakhir (1994-1996), dengan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa surplus tersebut lebih dari sekedar sebuah siklus (Mulyana, 2009).

Selain New Zealand terdapat beberapa negara lain yang telah menerapkan SAP akruwal basis ini. Australia dan Inggris misalnya, kedua negara ini juga merupakan negara yang telah menerapkan akruwal basis tersebut. Di Australia sebelum tahun 1990, pemerintah Australia menggunakan basis modifikasi kas (*cash modified*)

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk pelaporan keuangan dan penganggaran. Untuk Inggris sendiri dalam penerapan SAP berbasis akrual, Inggris telah menerapkannya untuk individual departemen/lembaga pada tahun 2000 dan untuk laporan keuangan konsolidasi menerapkannya di tahun 2006. Selain itu, Inggris beralih ke sistem manajemen berbasis sumber daya (*resource-based*) atau *accrual-based* sejak April 2001. Pemerintah Inggris ditempatkan sebagai negara maju dalam reformasi manajemen keuangan sektor publik dengan dilakukannya peralihan ini. Inggris dinyatakan sebagai negara *pioneer* yang mengimplementasikan *accrual-based budgeting* karena Inggris diklaim sebagai “tanah kelahiran” *New Public Management* (Athukorala dan Reid, 2003).

Untuk di Asia sendiri terdapat beberapa negara yang sedang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut terdapat kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapannya. Di Malaysia misalnya, seperti di banyak negara berkembang terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk mengikuti kursus yang mengarah pada kualifikasi akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006).

Berbeda dengan Malaysia, di Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari Kementrian Auditor Pemerintah dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Juta Tikk, 2010). Pada pulau Fiji juga terdapat terlalu banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Geoffrey Tickell, 2010).

Di Indonesia sendiri penerapan SAP akrual basis ini juga masih memiliki kendala-kendala maupun hambatan dalam proses penerapannya. Kendala utama yang sama dengan negara lainnya dalam penerapan SAP akrual basis ini yaitu kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai. Khusus terkait SDM, kendalanya adalah

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

latar belakang pendidikan yang kebanyakan bukan dari akuntansi sehingga menyebabkan pemahaman dan pengimplementasian PP No. 71 Tahun 2010 kurang maksimal. Pentingnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan juga dijelaskan dalam hasil wawancara Agus Hermawan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Senin, 9 November 2015 yang mengatakan:

"Kami akan pastikan di kabupaten/kota dan seluruh OPD harus ada SDM yang memiliki kemampuan untuk membuat laporan. Saya sampai ke kesimpulan bahwa laporan keuangan saat ini atau akrual base itu hanya bisa dibuat oleh seorang akuntan, oleh karena itu mutlak diperlukan orang punya keahlian akuntansi, seorang akuntan lebih disukai, jadi di tiap OPD dan kabupaten/kota di Provinsi ada. Jadi untuk SDM kita harus menyiapkan bahwa semua OPD harus ada akuntannya yang berkewajiban membuat laporan terkait laporan keuangan. Bisa PNS bisa juga konsultan, tapi lebih baik konsultan resmi," jelas Heryawan. (<http://www.galamedianews.com/>: 22 November 2015).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (KSAP, 2006, hlm.3). Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah dengan penerapan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling sering muncul adalah terkait kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Ardiansyah (2012) menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukannya berhasil menemukan bukti adanya pengaruh kuliatas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandung II Susanto juga mengatakan:

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bahwa dengan adanya penerapan SAP berbasis akrual maka informasi akuntansi akan disajikan secara transparan dan akuntabel. Namun, terdapat kendala dari penerapan SAP berbasis akrual ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memang masih belum optimal, masih banyak dari pegawai maupun staf keuangan yang latar belakang pendidikannya bukan dari akuntansi sehingga sulit untuk memahami SAP itu sendiri.

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas sehingga informasi akuntansi yang diberikan juga berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK (Ketut, 2009).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis memaparkan hasil pemeriksaan terhadap 35 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Selasa, 12 April 2016. Menurut beliau, BPK hanya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada satu LKPD. "Opini wajar dengan pengecualian (WDP) bagi 17 LKPD, opini tidak wajar (TW) bagi satu LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) bagi 16 LKPD," kata Harry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015, BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan 504 LKPD tahun 2014. "Dengan hasil pemeriksaan itu, perolehan opini atas 539 LKPD tahun 2014 meningkat dibanding 2013," ujar Harry. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap semua LKPD tahun 2014, opini WTP diberikan kepada 252 LKPD, opini WDP diberikan kepada 247 LKPD, opini TMP diberikan kepada 35 LKPD, dan opini TW diberikan kepada 5 LKPD. "Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP baik dari 126 LKPD menjadi 252 LKPD atau 18 persen," tutur Harry. Namun menurut Harry, pemerintah menghadapi tantangan yang lebih berat pada 2015. Tahun lalu, pemerintah menerapkan basis akrual dalam LKPD. "Hal itu dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah," ujar Harry. (<https://m.tempo.co/read/news>: diakses pada 18 Mei 2016).

BPK RI Perwakilan Jawa Barat telah memberikan LHP atas LKPD 2014 kepada 26 pemerintah daerah. Dari laporan tersebut pemerintah daerah yang mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Kota Banjar, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kabupaten Ciamis. Terdapat empat daerah lain yang juga memperoleh WTP yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada pula pemerintah daerah lainnya yang berhasil meningkatkan opini dari wajar dengan pengecualian menjadi WTP. Selain itu, untuk Kabupaten Karawang dan Kota Bandung masih memperoleh WDP sama halnya dengan tahun lalu. Sedangkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu berhasil meningkatkan opini laporan keuangannya menjadi WDP yang sebelumnya memperoleh *disclaimer*. Dari rekapitulasi 26 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah diserahkan LHP atas LKPD tahun anggaran 2014 hingga senin (1/6/2015), terdapat 12 pemerintah daerah meraih WTP dan 14 daerah lainnya meraih WDP (www.pikiranrakyat.com : diakses 9 Oktober 2015).

Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan dari pemeriksaan BPK. Banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. Adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga pemda menjadi bingung harus berkiblat kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan, sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi jika pemda memiliki komitmen kuat dan konsisten melakukan pembenahan, sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai *reward* dan *punishment* yang jelas untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan, pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola laporan keuangan, peningkatan kualitas SDM khususnya lulusan akuntansi sangat diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemda yang ideal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Tahria Syfrudin, 2012).

Untuk kabupaten Bandung sendiri perolehan opini WDP dari BPK disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu Bupati Kab. Bandung Dadang M Naser, Kamis (16/6) menyatakan :

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun ini Kabupaten Bandung kembali mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Bandung. “LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK sudah dapat, kita WDP plus atau WTP (wajar tanpa pengecualian)”. Sama halnya dengan raihan WDP tahun lalu, Dadang mengatakan yang menjadi titik masalah masih dalam hal pendataan aset. Perbaikan pelaporan aset, sebenarnya sudah dilakukan, namun untuk tahun ini pendataan aset harus menggunakan akrual yang sedikit lebih rumit. “Tindak lanjut dari tahun lalu sebenarnya sudah rapi. Tapi untuk aset memang masih ada beberapa beda persepsi dengan BPK,” katanya.

Menurutnya, BPK mengharuskan pencatatan aset secara rinci namun data aset yang diberikan Pemkab Bandung banyak yang bersifat umum. “Memang BPK meminta rinci, jadinya harus apik” ucapnya. Dia mencontohkan dalam pelaporan kendaraan yang harus sangat detil. Sementara, laporan yang diberikan Pemkab Bandung tidak terlalu detil seperti yang diharuskan oleh BPK. “Nomor rangka kendaraan juga harus dimunculkan di laporan” ucapnya. Contoh lain yang menjadi masalah adalah pencatatan aset sekolah. Menurut Dadang, banyak sekolah di Kabupaten Bandung yang lokasinya berada di pelosok. “Untuk sekolah, alamat saja harus jelas dilaporkan, termasuk nama jalannya, sementara kebanyakan laporan kita tidak sedetil itu, makanya mendapat WDP. Bahkan, kalau pas pelaporan diberi waktu satu bulan lagi saja, saya yakin bisa dapat WTP, karena pelaporan aset hanya tinggal melengkapi,” imbuhnya. Kendati demikian, Dadang berjanji akan melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap catatan-catatan yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Bandung. “Kita akan respon terus catatan dari BPK, supaya raihan WTP bisa tercapai,” tandasnya (<http://www.soreangonline.com/>: di Akses pada 2 September 2016).

Pernyataan dari Bupati Kabupaten Bandung tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Kabupaten Bandung sendiri dikatakan masih belum lengkap, dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa salah satu laporan keuangan yang dalam hal ini laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik yaitu relevan dimana informasi akuntansi dikatakan relevan apabila memenuhi syarat lengkap dengan arti informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Untuk opini BPK atas LHP Kabupaten Bandung tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan belum dapat dikatakan lengkap dikarenakan masih terdapat pencatatan yang dilakukan secara tidak rinci.

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indra Bastian (2006, hlm.55) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP. Betapapun bagus SAP, tanpa didukung SDM yang handal maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Oleh karena itu, tugas yang berkaitan dengan akuntansi baik itu penyusunan laporan keuangan harus dikerjakan oleh seorang yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan (akuntansi).

Pada organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Handayani, 2010). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010, hlm.297).

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong kita mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas (Friska dkk: 2015). Untuk mendukung terwujudnya *good governance*, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan juga berkualitas dan akan membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapainya maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan SAP berbasis akrual tersebut, sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan informasi yang berkualitas nantinya.

Penelitian I Gede Agus Yudianta dkk (2012) mengenai pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yang menarik kesimpulan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.

Namun demikian berbeda dengan penelitian tersebut Tantriani Sukmaningrum dan Puji Harto (2010) menemukan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dipahami karena dari sisi jumlah masih kekurangan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Penelitian lain yang mendukung, beberapa diantaranya yaitu penelitian Ni Made Ari Widyastuti dkk (2013) mengenai analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar yang menarik kesimpulan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah Kabupaten Gianyar dapat dikatakan belum siap karena mereka belum memahami sepenuhnya mengenai basis akrual. Ikrima Chikita dkk (2015) pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil statistik menunjukkan bahwa 77,4 persen kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota dan

pemerintah provinsi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya yang tidak lain adalah pegawai-pegawai yang mengabdikan di satuan kerja yang bersangkutan.

Sudaryati Dkk (2014) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan akuntansi akrual dengan perangkat pendukung sebagai variabel moderating (studi empiris pada pemerintah Kota Yogyakarta) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi akrual (PP No.71 Tahun 2010). Kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan perangkat pendukung tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Akuntansi Akrual (PP No.71 Tahun 2010).

Hal lain yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan SAP berbasis akrual sebagai variabel *intervening*. Fenomena penerapan SAP berbasis akrual ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa penerapan SAP berbasis akrual itu sendiri yang secara penuh baru diterapkan di awal tahun 2015 dan kualitas informasi akuntansi yang dalam hal ini laporan keuangan. Dimana untuk LKPD yang masih mendapatkan opini WDP dan disclaimer dari BPK. Pemilihan Kab. Bandung dan Kota Cimahi sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana kompetensi SDM dari SKPD kab/kota tersebut dan apakah dari kedua kab/kota tersebut dapat meningkatkan opini lapkeu mereka kedepannya setelah penerapan SAP berbasis akrual diterapkan penuh tahun lalu.

Berdasarkan uraian di atas penulis beranggapan perlu melakukan penelitian lebih dalam dengan judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Penerapan SAP Berbasis Akrual”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap SAP berbasis akrual?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi?
3. Apakah SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi melalui penerapan SAP berbasis akrual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi;
3. Untuk mengetahui pengaruh SAP berbasis akrual terhadap kualitas informasi akuntansi;
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi melalui penerapan SAP berbasis akrual.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam lagi penelitian di sektor publik. Selain itu, manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah dengan

Nur Hasanah, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adanya hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan terhadap pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai akrual basis.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat. Dan untuk kualitas informasi akuntansi akan semakin baik. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kembali mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi akuntansi melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.